

Judul : Kinerja DPR tahun depan diprediksi memburuk
Tanggal : Jumat, 22 Desember 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

Hussein Abri Dongoran

hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun depan bakal lebih buruk dibanding tahun ini. Koordinator Formappi, Sebastian Salang, mengatakan hal itu sangat mungkin terjadi karena para anggota Dewan akan sibuk bersama partai masing-masing untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 sekaligus persiapan pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. "Para anggota DPR pasti ditugasi partai untuk memenangkan agenda politik tersebut," katanya, kemarin.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan kinerja legislasi DPR tahun ini sangat tak memuaskan. Undang-undang yang disahkan jauh dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan. "Hingga akhir

Kinerja DPR Tahun Depan Diprediksi Memburuk

Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna rendah.

masa sidang, DPR hanya bisa menyelesaikan enam dari 50 rancangan undang-undang (RUU)," ujarnya.

Di sisi kualitas, produk undang-undang yang dihasilkan DPR itu pun rendah. Walhasil, sebagian undang-undang itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Antara lain Undang-Undang Pemilihan Umum dan Un-

dang-Undang Organisasi Masyarakat.

Dalam catatan Formappi, sejak 2016 hingga 2017 terdapat 57 perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam soal gugatan terhadap undang-undang itu. Dari angka itu, ucap Lucius, 16 perkara dikabulkan oleh Mahkamah, 19 ditolak, 19 putusan

perkara tidak dapat diterima, 7 perkara ditarik kembali putusannya, dan 3 perkara gugur.

Direktur Komite Pemanfaatan Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah, menyatakan banyak faktor yang menyebabkan buruknya kerja legislasi tahun ini. Salah satunya adalah sikap DPR yang lebih asyik menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi, di antaranya melalui pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK. "Tahun ini juga ada 13 anggota DPR yang diduga terlibat korupsi," katanya.

Lembaga yang kerap memantau persidangan di DPR, WikiDPR, juga mengeluarkan hasil kajian yang tidak jauh berbeda. Dalam laman WikiDPR.org, tercatat bahwa sebagian besar anggota Dewan gemar membolos. Tingkat kehadiran mereka dalam rapat paripurna rendah, yakni hanya 41,43 persen. "Rata-rata kehadiran adalah 232 dari 560 anggota DPR," ujarnya.

Ketua Komisi Pemerin-

lahan Zainuddin Amali mengakui kinerja legislasi DPR kurang memuaskan. Masalahnya, ia melanjutkan, jumlah target di Prolegnas terlalu banyak dibanding waktu yang dimiliki DPR. Padahal pembahasan undang-undang tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi jika ada tarik-menarik kepentingan antarfraksi maupun pemerintah.

Politikus Golkar itu meminta supaya jumlah Prolegnas lebih dirasionalkan dan disesuaikan dengan waktu yang dimiliki anggota DPR hingga ketersediaan sumber daya manusia. "Ke depan, semoga urusan pembahasan undang-undang ditangani oleh satu komisi, agar bisa fokus," katanya. Thwal banyaknya anggota Dewan yang bolos rapat, Zainuddin berkilah mereka tak hadir hanya pada rapat yang agendanya kurang penting, misalnya hanya membacakan surat. "Kalau pemungutan suara, pasti banyak yang hadir."

Wakil Ketua Komisi Hukum Trimedya Panjaitan

Besar Anggaran Tak Menjamin Kinerja

Selama enam tahun ke belakang, anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat cenderung naik. Toh, kenaikan anggaran itu tidak selalu seiring dengan naiknya kinerja.

2011

Anggaran DPR:

Rp 1,74 triliun

Untuk legislasi:

Rp 301,7 miliar

Kinerja > Dari 91 RUU prioritas, hanya 18 yang disahkan.

2012

Anggaran DPR: Rp 2 triliun

Untuk legislasi:

Rp 501,2 miliar

Kinerja > Dari 69 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.

2013

Anggaran DPR:

Rp 2,88 triliun

Untuk legislasi:

Rp 473,9 miliar

Kinerja > Dari 75 RUU prioritas, hanya 7 yang disahkan.

2014

Anggaran DPR:

Rp 2,31 triliun

Untuk legislasi:

Rp 309,1 miliar

Kinerja > Dari 68 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.

2015

Anggaran DPR:

Rp 5,19 triliun

Untuk legislasi:

Rp 430,5 miliar

Kinerja > Dari 37 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.

2016

Anggaran DPR: Rp 4,7 triliun

Untuk legislasi:

Rp 309,4 miliar

Kinerja > Dari 50 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.

2017

Anggaran DPR:

Rp 4,26 triliun

Anggaran legislasi:

Rp 116,8 miliar

Kinerja > Dari 50 RUU prioritas, hanya 8 yang disahkan.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN

meminta masyarakat tidak hanya menyalahkan DPR dalam kinerja legislasi. "Bisa saja DPR setuju tapi pemerintah tak setuju, dan itu yang membuat belum sepakat," ujarnya. ● AHMAD FALQ